

POLICY BRIEF

REFORMULASI KOORDINASI LINTAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA UNTUK MEWUJUDKAN EKOSISTEM PENDIDIKAN VOKASI YANG TERINTEGRASI



PENULIS:
Kristiani

DITUJUKAN KEPADA:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan vokasi Indonesia menghadapi tantangan serius: lulusan SMK konsisten menjadi penyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi (8,45%, BPS November 2025), mengindikasikan skills mismatch yang masih akut antara output pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha/industri (DUDI). Akar masalahnya bukan ketiadaan regulasi, melainkan fragmentasi pelaksanaan lintas kementerian/lembaga yang belum teratasi meskipun Inpres No. 9/2016 dan Perpres No. 68/2022 telah diterbitkan.

Untuk mengatasi masalah ini, policy brief ini merekomendasikan lima alternatif solusi kebijakan:

1. Penguatan mekanisme koordinasi operasional lintas K/L berbasis mandat dan target kinerja bersama;
2. Pengembangan Sistem Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Nasional berbasis wilayah dan sektor;
3. Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Vokasi Nasional Terintegrasi 2026–2035;
4. Penguatan kapasitas guru dan instruktur berbasis skema industri; serta
5. Integrasi sistem pengakuan kompetensi non-formal dan micro-credential.

Rekomendasi terpilih: Penguatan Mekanisme Koordinasi Operasional Lintas K/L, karena merupakan prasyarat utama agar keempat solusi lainnya dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur.

PENDAHULUAN

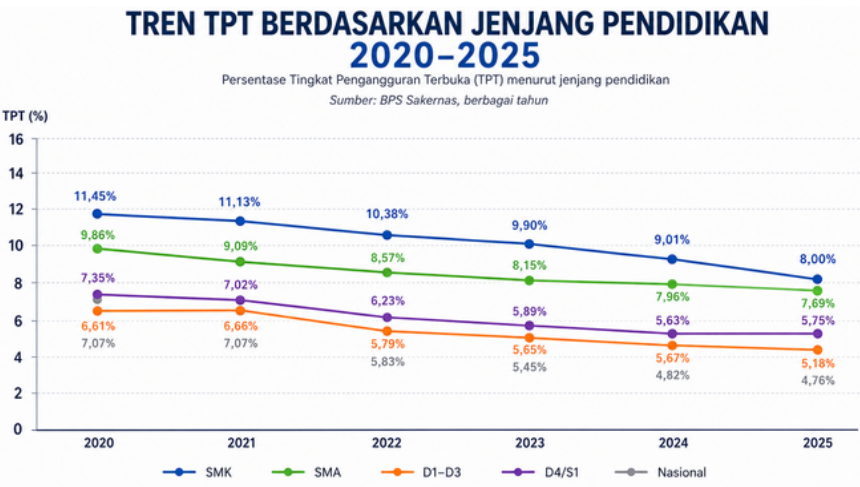
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu menyiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan tinggi. Data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa TPT lulusan SMK mengalami fluktuasi namun tetap tertinggi di antara semua jenjang pendidikan: 11,45% (2020), 11,13% (2021), 10,38% (2022), 9,90% (2023), 9,01% (Februari 2024), 8,00% (Februari 2025), dan 8,45% (November 2025). Tren penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, namun gap dengan jenjang pendidikan lain masih signifikan dan membutuhkan intervensi kebijakan yang terkoordinasi.

Kerja sama antara SMK dan dunia kerja saat ini masih didominasi praktik kerja industri dan magang, sementara koordinasi lintas kementerian/lembaga yang diamanatkan Inpres No. 9/2016 dan Perpres No. 68/2022 belum berjalan optimal. Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang seharusnya menjadi orkestrator ekosistem vokasi di daerah masih menghadapi kendala operasional. Elite capture dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat juga memperparah fragmentasi ini. Untuk itu, reformulasi mekanisme koordinasi lintas K/L menjadi langkah mendesak untuk diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

DESKRIPSI MASALAH

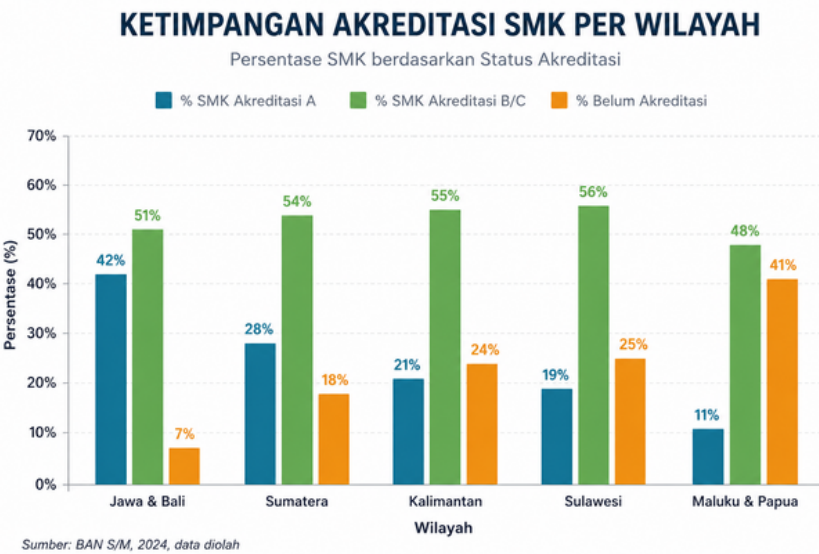
Mismatch Lulusan Vokasi dan Pasar Kerja (Keterserapan Rendah)

Meskipun SMK dirancang untuk menghasilkan lulusan siap kerja, data BPS (November 2025) menunjukkan lulusan SMK masih mendominasi TPT nasional sebesar 8,45%. Tren dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan penurunan yang lamban dan TPT SMK konsisten tertinggi dibanding jenjang lain (SMA: 7,69%, D1–D3: 5,18%, D4/S1: 5,75%). Mismatch ini mengindikasikan bahwa investasi pendidikan vokasi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi human capital yang relevan bagi kebutuhan pasar. Tanpa perbaikan kecocokan kompetensi, upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi akan berdampak sub-optimal terhadap ketenagakerjaan (Becker, 1964).



Disparitas Kualitas Antar Satuan Pendidikan dan Keterbatasan Sarana/Prasarana

Kajian implementasi Perpres No. 68/2022 (Bruri & Hariyanto, 2024) menemukan ketimpangan signifikan antar SMK terkait akreditasi, fasilitas praktik, dan akses teknologi. SMK di kawasan industri perkotaan memiliki akses jauh lebih baik dibanding SMK di daerah terpencil. Akses terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pun belum merata: SMK di wilayah padat industri lebih mudah membangun kemitraan dibanding SMK di daerah terpencil (Bruri Triyono, M., & Hariyanto, D, 2024). Tabel disamping menggambarkan ketimpangan akreditasi SMK antar wilayah sebagai proksi disparitas kualitas. Disparitas ini mengurangi kapasitas sistem untuk memenuhi permintaan tenaga kerja terampil secara merata. Kebijakan seragam tanpa diferensiasi wilayah akan memperparah ketimpangan keterserapan.



Kualifikasi Pendidik dan Distribusi Pelatihan (Upskilling/Reskilling Belum Merata)

Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan persentase guru SMK yang memenuhi kualifikasi pendidikan masih bervariasi signifikan antar daerah, dengan rata-rata nasional 96,75%. Provinsi di Sulawesi cenderung memiliki persentase lebih tinggi, sementara Papua dan Maluku masih di bawah rata-rata nasional. Namun yang lebih krusial adalah rendahnya persentase guru produktif SMK yang memiliki sertifikat kompetensi industri,yang menjadi prasyarat utama kualitas pembelajaran vokasi. Agenda upskilling dan reskilling guru vokasi yang dijalankan BBPPMPV belum merata antar daerah dan sekolah. Tanpa tenaga pendidik yang kompeten dan agenda upskilling yang terkoordinasi, kurikulum dan fasilitas terbaik sekalipun tidak akan menjamin lulusan yang kompetitif.

Fragmentasi Tata Kelola Lintas Kementerian/Instansi dan Ketiadaan Basis Data Kebutuhan Tenaga Kerja yang Terintegrasi

Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi besar: Inpres No. 9/2016 (Revitalisasi SMK), Perpres No. 68/2022 (Revitalisasi Pendidikan Vokasi), dan Permenko PMK No. 6/2022 (Strategi Nasional Pendidikan Vokasi). Namun evaluasi implementasi menunjukkan masalah utama bukan ketiadaan kebijakan, melainkan fragmentasi pelaksanaan: tugas dan kewenangan tersebar di lebih dari 13 kementerian/lembaga tanpa mekanisme integrasi data dan perencanaan yang operasional. Studi implementasi Perpres 68/2022 (Hasanah et al., 2023) menemukan bahwa forum koordinasi lintas K/L yang ada baru bersifat koordinatif administratif, bukan eksekutif. Akibatnya, peta kebutuhan tenaga kerja sektoral/daerah tidak tersedia, target program saling silang, dan capaian demand-driven sulit diukur.

Kesiapan Menghadapi Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau — Celah Identifikasi Kecakapan Masa Depan

Perubahan teknologi, digitalisasi, dan kebutuhan kompetensi ekonomi hijau menuntut keterbaruan kurikulum, sistem pelatihan, dan mekanisme pengakuan kompetensi non-formal. OECD (2023) menekankan pentingnya strategi skills foresight nasional yang adaptif dan berbasis data agar negara dapat menutup gap antara kebutuhan masa depan dan output pendidikan (OECD, 2023). Indonesia belum memiliki sistem pemetaan keterampilan masa depan yang terintegrasi dan mekanisme pengakuan kompetensi non-formal yang memadai, sehingga sistem vokasi berisiko tertinggal dari kebutuhan pasar yang cepat berubah.

ALTERNATIF SOLUSI

Alternatif 1 — Penguatan Mekanisme Koordinasi Operasional Lintas K/L Berbasis Mandat dan Target Kinerja Bersama

Kemendikdasmen selaku koordinator, bersama Kemnaker, Kemenperin, Bappenas, dan K/L terkait lainnya merevitalisasi forum koordinasi vokasi yang sudah ada menjadi forum eksekutif dengan: rencana kerja tahunan lintas K/L, indikator kinerja bersama (joint performance indicators), kewajiban pelaporan progres secara periodik, serta mekanisme eskalasi keputusan yang jelas. TKDV di daerah diperkuat sebagai perpanjangan tangan koordinasi di tingkat provinsi/kabupaten.

Alternatif 2 — Pengembangan Sistem Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Nasional Berbasis Wilayah dan Sektor (National Skills Mapping System)

BPS, Kemnaker, dan Kemendikdasmen berkolaborasi membangun platform integrasi data ketenagakerjaan (Sakernas, data industri, data investasi, kawasan industri) dengan data pendidikan vokasi (jumlah lulusan, kompetensi, program keahlian). Pembaruan berkala (minimal tahunan), dengan kewajiban penggunaan data sebagai dasar pembukaan/penutupan program keahlian di SMK.

Alternatif 3 — Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Vokasi Nasional Terintegrasi 2026–2035

Bappenas bersama Kemendikdasmen dan K/L terkait menyusun dokumen rencana induk lintas K/L yang mengintegrasikan arah pendidikan vokasi formal (SMK), nonformal (LKP), dan pelatihan kerja; mengaitkan perencanaan pendidikan dengan strategi hilirisasi industri, ekonomi digital, dan ekonomi hijau; serta mengatur mekanisme pembiayaan bersama pusat–daerah–industri.

Alternatif 4 — Penguatan Kapasitas Guru dan Instruktur Berbasis Skema Industri

Kemendikdasmen melalui BBPPMPV menjalankan program magang industri wajib bagi guru produktif secara berkala, skema co-teaching antara guru dan praktisi industri, insentif bagi industri yang menyediakan tempat magang guru, serta target peningkatan persentase guru SMK bersertifikat kompetensi industri.

Alternatif 5 — Integrasi Sistem Pengakuan Kompetensi Non-Formal dan Micro-Credential

BNSP bersama Kemendikdasmen dan Kemnaker memperkuat sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), mengintegrasikan sertifikat pelatihan jangka pendek ke dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan mengembangkan micro-credential untuk bidang digital dan green skills.

REKOMENDASI

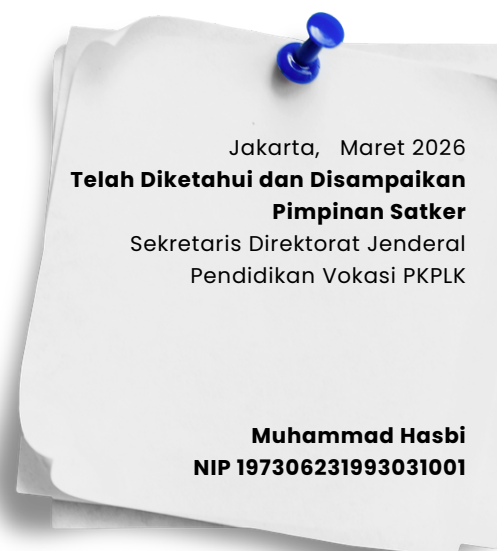
REKOMENDASI TERPILIH:

Penguatan Mekanisme Koordinasi Operasional Lintas K/L Berbasis Mandat dan Target Kinerja Bersama

Alasan pemilihan: Alternatif 1 merupakan prasyarat utama (enabling condition) bagi keberhasilan seluruh alternatif lainnya. Tanpa mekanisme koordinasi yang operasional, pengembangan sistem pemetaan, rencana induk, penguatan guru, maupun integrasi micro-credential akan kembali berjalan sektoral dan terfragmentasi.

Langkah implementasi rekomendasi terpilih:

1. Kemenko PMK menerbitkan Surat Keputusan revitalisasi forum koordinasi vokasi lintas K/L dengan mandat eksekutif (bukan sekadar koordinatif administratif).
2. Kemendikdasmen menyusun rancangan joint performance indicators lintas K/L dalam 3 bulan pertama, mencakup: tingkat serapan lulusan SMK, persentase SMK yang bermitra dengan DUDI, dan jumlah guru yang mengikuti upskilling industri.
3. TKDV di 34 provinsi diaktifkan dengan panduan operasional yang jelas, target terukur, dan dukungan anggaran dari APBN/APBD.
4. Mekanisme pelaporan progres lintas K/L ditetapkan secara triwulanan kepada Kemenko PMK, dengan dashboard terpadu yang dapat diakses publik.
5. Evaluasi berkala setiap 6 bulan dengan melibatkan perwakilan DUDI dan asosiasi industri sebagai pemangku kepentingan eksternal.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Jakarta: BPS.
- BAN S/M. (2024). Data Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan Nasional. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Becker, G.S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
- Bruri Triyono, M., & Hariyanto, D. (2024). Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. Springer International Handbooks of Education. Springer, Singapura.
- Hasanah, U., et al. (2023). Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Jakarta: Bappenas.
- Kemendikbudristek. (2023). Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik pada Jenjang SMK/MAK/Sederajat. Jakarta: Kemendikbudristek.
- OECD. (2023). OECD Skills Strategy Southeast Asia: Skills for a Post-COVID Recovery and Growth. OECD Publishing, Paris.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.